



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 20%

Date: Wednesday, March 14, 2018

Statistics: 151 words Plagiarized / 768 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

Mualem Mencari 'Pendamping' Rabu, 10 Februari 2016 12:20 Oleh M. Akmal SEMUA kandidat calon gubernur Aceh, kini sibuk mencari calon pendampingnya (wakil gubernur). Demikian pula sebagian masyarakat Aceh yang menginginkan calon pemimpin terbaik, kini sibuk menunggu siapa kandidat calon wakil gubernur. Semua elite politik Aceh sibuk memprediksi dan menghitung siapa kandidat terkuat untuk menjadi calon wakil gubernur.

Menyimak berita headline "Ini Bakal Cawagub Mualem", yang menampilkan enam foto headshot kandidat calon wakil gubernur, "Bursa Pendamping Muzakir Manaf", ditambah dengan pernyataan menarik dan penting dari Mualem yang menjadi judul berita bahwa satu kriteria calon wakil gubernur yang diinginkan adalah sosok kandidat yang mampu "Membangun Hubungan dengan Jakarta" (Serambi, 6/2/2016).

Ini menjadi menarik, karena Muzakir Manaf sebagai Ketua Partai Aceh, partai politik lokal yang dominan di Aceh mulai menyampaikan pesan kepada para calon pemilihnya agar menyadari bahwa siapapun yang akan menjadi kepala pemerintahan Aceh ke depan, harus mampu membangun hubungan dengan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Karena desentralisasi asimetris yang telah direstui Jakarta untuk Aceh melalui UUPA, masih tumpul dan bisa dikatakan nyaris sami mawon dengan desentralisasi simetris yang diterapkan secara Nasional di seluruh provinsi di Indonesia.

Sejarah khusus

Mualem ingin memberitahukan kepada rakyat Aceh bahwa Aceh punya sejarah khusus yang sama seperti sejarah Papua, sehingga apa yang ditulis dan dipresentasikan oleh Djohermansyah Djohan, mantan Dirjen Otda yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional AIPI di Menado, 15 Agustus 2007, dan dikutip oleh Dr Ni'matul Huda SH

MHum, dalam bukunya "Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus", 2014, Penerbit Nusa Media, halaman 63: Desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) bukanlah pelimpahan kewenangan biasa.

Dia berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Secara empirik dia merupakan strategi komprehensif Pemerintah Pusat guna merangkul kembali daerah-daerah yang hendak memisahkan diri dari pangkuan ibu pertiwi. Dia mencoba mengakomodasi tuntutan dan identitas lokal ke dalam sistem pemerintahan lokal yang khas.

Dengan begitu diharapkan perlawanan terhadap pemerintahan Nasional dan keinginan untuk merdeka dapat dieleminasi lewat sistem pemerintahan lokal yang spesifik, seperti yang dipraktikkan di beberapa negara antara lain wilayah Quebec di Kanada, Mindanao di Filipina, Bougainville di Papua New Guinea, dan Basque di Spanyol. Mereka, misalnya, boleh punya bendera, bahasa, partai politik lokal, dan bagi hasil sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.

Pesan Djohermansyah Djohan sangat jelas bahwa Aceh diberikan kewenangan menjadi daerah Otonomi Khusus karena Aceh adalah provinsi pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kisah pemberontakan Aceh terhadap Jakarta adalah "film dokumenter" sejarah Nasional yang "dibintangi" para pemimpin pemberontak, setelah di-amnesti Jakarta kemudian menjadi Gubernur/wakil Gubernur (Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar) dan saat ini dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang akan berakhir pada 2017.

Label Aceh sebagai provinsi pemberontak mungkin mengandung makna terlalu ekstrim, tapi ini kenyataan tertulis dan harus diakui sebagai energi utama yang telah mendorong Jakarta melakukan politik akomodatif untuk Aceh yang dikhususkan dan dibedakan dengan provinsi lain. Meski harus diakui saat ini pengkhususan untuk Aceh melalui UUPA masih jauh dari pesan yang ditulis oleh pak Djohermansyah Djohan.

Dokumentasi Muzakir Manaf sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka masa lalu, yang kini mencalonkan diri sebagai salah satu Cawagub Aceh semakin seru ketika "sang panglima" ingin mencari jembatan penghubung politik real dengan Jakarta yang belum pernah dibangun oleh dua gubernur sebelumnya pasca MOU Helsinki, dengan tujuan agar Aceh bisa menjalankan sistem pemerintahan lokal yang spesifik dengan dukungan undang-undang dan kebijakan-kebijakan politik dari "penguasa politik" Jakarta yang dipimpin oleh parnas.

Jembatan politik Inilah sebenarnya inti pesan kandidat calon gubernur Aceh Muzakir Manaf yang ditegaskan sebagai kriteria utama dari calon wakil gubernur yang akan mendampinginya, yang diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk membangun hubungan dengan Jakarta. Hanya melalui jembatan itulah (dukungan legislatif dan eksekutif Jakarta) Aceh akan menjadi daerah otonomi yang asimetris.

Hanya berteman dengan parnas yang berpengaruh dan menguasai Jakarta, maka berbagai regulasi dan kebijakan khusus yang dituntut dalam butir-butir MoU Helsinki 2005 dapat dilaksanakan di Aceh. Bahkan, bukan tidak mungkin melalui "jembatan politik" merangkul cawagub dari parnas, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) akan diamandemen oleh Jakarta (DPRI RI) dengan pasal-pasal baru untuk mengkomodifikasi tuntutan yang telah disepakati dalam MoU Helsinki.

Sehingga lahir UUPA baru, tidak seperti UUPA 'ompong' saat ini, yang dalam penerapannya menjadikan otonomi Aceh sama dengan otonomi yang diberlakukan untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk memuluskan hubungan Aceh dan Jakarta, dan untuk mendorong percepatan berbagai regulasi yang dituntut dalam konsep desentralisasi asimetris tadi, Mualem hanya tinggal mencari cawagub dari parnas yang sebelumnya pernah tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipimpin Prabowo, atau parnas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin Megawati. Nah, siapa dia? * M. Akmal, S.Sos, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Email: m_akmal@yahoo.com

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Mualem Mencari 'Pendamping', <http://aceh.tribunnews.com/2016/02/10/mualem-mencari-pendamping>.

Editor:

INTERNET SOURCES:

-
- <1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada_rabu_3_februari_2016
 - <1% - <https://jurnalskripsitesis.wordpress.com/category/skripsi-ilmu-pemerintahan/>
 - 1% - <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40678216>
 - 4% - http://www.academia.edu/14429227/Menyibak_Pelaksanaan_Desentralisasi_Asimetris_Di_Indonesia_Tata_Kelola_Pemerintahan_Daerah_Di_Era_Demokrasi_Yang_Mengharu_Biru
 - 7% - <https://fkphguide.files.wordpress.com/2015/01/desentralisasi-asimetris.ppt>
 - 2% -

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=397483&val=8691&title=PELAKSANAAN%20DESENTRALISASI%20ASIMETRIS%20DALAM%20TATA%20KELOLA%20PEMERINTAHAN%20DAERAH%20DI%20ERA%20DEMOKRASI>

1% -

<https://acehabad.blogspot.com/2016/12/sekilas-profil-singkat-keenam-pasangan.html>

1% - <https://documents.mx/documents/waspada-sabtu-17-november-2012.html>

2% -

<https://adamrendeng.wordpress.com/2015/06/08/pendidikan-islam-di-indonesia-pada-masa-penjajahan-jepang/>

<1% - <http://pilihtafhaikal.blogspot.com/2012/>

1% -

<https://mkomumj.wordpress.com/2016/07/20/urgensi-diplomasi-publik-dalam-membentuk-opini-terhadap-citra-islam-indonesia-sebagai-islam-yang-moderat-pada-dunia-internasional/>

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__kamis_29_maret_2012

1% - <https://documents.mx/documents/waspadasabtu-31-januari-2015.html>

1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada__rabu_25_januari_2017